

PENINGKATAN LITERASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI BERBASIS MEDIA BANNER DI KANTOR LURAH PANORAMA

Sinta Permata Sari^{*1}, Rifa'i², Lesti Heriyanti³
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
Email: * rifai@umb.ac.id

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, literasi pajak masyarakat masih menjadi persoalan karena sebagian wajib pajak belum memahami fungsi PBB, prosedur pembayaran, manfaat pembayaran tepat waktu, serta kemudahan layanan yang tersedia di tingkat kelurahan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran membayar PBB dan munculnya kecenderungan masyarakat memenuhi kewajiban pajak hanya ketika memiliki kebutuhan administrasi tertentu. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi masyarakat Kelurahan Panorama mengenai PBB melalui sosialisasi berbasis media banner yang ditempatkan di Kantor Lurah Panorama, Kota Bengkulu. Metode kegiatan meliputi observasi awal, koordinasi dengan perangkat kelurahan, identifikasi permasalahan, penyusunan materi edukasi, desain dan pencetakan banner, sosialisasi kepada masyarakat, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa media banner dapat menjadi sarana edukasi visual yang sederhana, praktis, dan mudah diakses oleh masyarakat dalam memahami manfaat dan prosedur pembayaran PBB. Banner juga membantu perangkat kelurahan menyampaikan informasi layanan administrasi pajak secara lebih terbuka dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan literasi pajak masyarakat, penguatan layanan administrasi kelurahan, dan dukungan terhadap optimalisasi pendapatan daerah.

Kata Kunci: literasi pajak; Pajak Bumi dan Bangunan; media banner; sosialisasi; administrasi publik.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki posisi strategis karena bersumber langsung dari objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengelolaan PBB yang efektif tidak hanya berkaitan dengan penerimaan daerah, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola administrasi publik dan tingkat literasi pajak warga. Literasi pajak dalam kegiatan ini dipahami sebagai pengetahuan

dan kesadaran masyarakat mengenai fungsi pajak, manfaat pembayaran, prosedur administrasi, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran. Administrasi publik yang baik menuntut layanan yang mudah diakses, jelas, transparan, dan tidak menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan informasi mengenai PBB melalui media edukasi yang sederhana dan mudah dibaca menjadi bagian penting dalam peningkatan literasi pajak di tingkat kelurahan.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Kelurahan Panorama berkaitan dengan masih rendahnya literasi sebagian wajib pajak dalam memahami kewajiban pembayaran PBB. Berdasarkan hasil observasi dan komunikasi dengan pihak Kelurahan Panorama, terdapat beberapa

kendala yang sering muncul, antara lain kurangnya edukasi mengenai pemungutan PBB, keterlambatan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), gangguan sistem pembayaran, antrean ketika pembayaran dilakukan di bank, serta kecenderungan masyarakat membayar PBB hanya ketika memiliki kebutuhan administrasi tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman, kemudahan akses informasi, kualitas pelayanan, dan intensitas sosialisasi. Rendahnya literasi pajak menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa PBB merupakan kontribusi warga terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap informasi PBB yang jelas dan ketersediaan media edukasi yang mudah dijangkau di lingkungan pelayanan kelurahan. Selama ini, informasi tentang pembayaran PBB cenderung disampaikan secara lisan atau hanya diketahui oleh masyarakat yang aktif bertanya kepada petugas. Akibatnya, masyarakat yang jarang datang ke kantor kelurahan atau belum memahami prosedur pembayaran PBB masih berpotensi mengalami kebingungan dalam memenuhi kewajibannya. Gap utama kegiatan ini terletak pada belum optimalnya media komunikasi visual yang dapat menyajikan informasi edukatif dan prosedural secara ringkas, praktis, dan berkelanjutan di ruang pelayanan publik. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menawarkan penggunaan banner informatif sebagai media sosialisasi PBB yang ditempatkan langsung di Kantor Lurah Panorama untuk memperkuat literasi pajak masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi masyarakat

Kelurahan Panorama mengenai pengertian, manfaat, fungsi, dan prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui sosialisasi berbasis media banner. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membantu pihak kelurahan menyediakan informasi layanan pembayaran PBB secara lebih terbuka, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi wajib pajak. Kontribusi kegiatan ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, dari aspek praktik administrasi publik, kegiatan ini menunjukkan bahwa media komunikasi visual sederhana dapat digunakan sebagai instrumen edukasi layanan publik. Kedua, dari aspek pembangunan daerah, kegiatan ini mendukung peningkatan literasi pajak masyarakat dan penguatan pendapatan daerah melalui kesadaran pembayaran PBB. Dengan demikian, fokus kegiatan tidak hanya pada kemudahan administrasi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peran pajak dalam pembangunan.

II. METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi edukatif dengan bantuan media banner sebagai sarana penyampaian informasi. Metode ini dipilih karena sesuai dengan permasalahan mitra, yaitu masih terbatasnya informasi praktis mengenai pembayaran PBB yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu observasi awal, koordinasi dengan pihak kelurahan, identifikasi permasalahan, penyusunan materi sosialisasi, pembuatan desain banner, pencetakan banner, penyerahan banner kepada pihak kelurahan, sosialisasi kepada masyarakat, dokumentasi pelayanan pembayaran PBB, serta evaluasi kegiatan. Observasi awal dilakukan pada 14 Agustus 2023 di Kantor Lurah Panorama untuk mengetahui kondisi layanan administrasi dan kendala masyarakat dalam pembayaran PBB.

Komunitas sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, khususnya warga yang memiliki kewajiban membayar PBB. Peserta kegiatan sosialisasi berjumlah [isi jumlah peserta] orang, yang terdiri atas warga Kelurahan Panorama dan perangkat kelurahan yang mendampingi pelaksanaan kegiatan. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi tim pengabdian, Lurah Panorama, sekretaris kelurahan, perangkat kelurahan, serta masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi. Tim pengabdian berperan sebagai perancang program, penyusun materi, pembuat desain banner, pelaksana sosialisasi, dan dokumentator kegiatan. Pihak kelurahan berperan sebagai mitra yang memberikan informasi mengenai permasalahan PBB, memfasilitasi tempat kegiatan, menerima banner, serta membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Produk utama yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini adalah banner informatif berukuran 160 x 60 cm yang berisi materi literasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Lurah Panorama. Banner tersebut memuat pesan edukatif mengenai pengertian PBB, pentingnya membayar PBB, manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah, serta informasi prosedural mengenai tahapan pembayaran. Tahapan pembayaran yang disampaikan kepada masyarakat meliputi membawa SPPT dan uang sesuai tagihan, melapor kepada pegawai kelurahan, pendataan dan penginputan informasi oleh petugas, serta pemberian bukti pembayaran sementara. Selain menjadi alat bantu administrasi, banner tersebut dirancang sebagai media literasi pajak yang dapat dibaca berulang oleh masyarakat.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pedoman observasi, catatan hasil diskusi dengan pihak

kelurahan, dokumentasi kegiatan, materi sosialisasi, dan banner sebagai media edukasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di Kantor Lurah Panorama, diskusi dengan perangkat kelurahan, dokumentasi foto kegiatan, serta pengamatan respons masyarakat selama kegiatan berlangsung. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi tersedianya banner literasi PBB di Kantor Lurah Panorama, terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi pembayaran PBB, serta adanya dukungan dari pihak kelurahan terhadap penggunaan banner sebagai media edukasi.

Analisis data dalam kegiatan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari observasi, diskusi, dan dokumentasi dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tahapan kegiatan, permasalahan mitra, bentuk intervensi, hasil yang dicapai, kendala, dan tindak lanjut. Analisis dilakukan untuk menjelaskan bagaimana media banner dapat membantu masyarakat memahami prosedur pembayaran PBB dan bagaimana kegiatan sosialisasi mendukung pelayanan administrasi di kelurahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Permasalahan Literasi dan Pembayaran PBB

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Panorama masih menghadapi berbagai hambatan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi PBB, kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan, keterlambatan penerbitan SPPT, gangguan sistem pembayaran, serta rendahnya kesadaran sebagian warga untuk membayar pajak tepat waktu. Sebagian masyarakat juga cenderung membayar

PBB ketika memiliki kepentingan administratif tertentu, misalnya ketika hendak mengurus pindah rumah, balik nama, atau dokumen kepemilikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembayaran PBB belum sepenuhnya dipahami sebagai kewajiban tahunan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Secara rasional, kondisi tersebut terjadi karena informasi pajak masih belum sepenuhnya tersaji dalam bentuk yang mudah dijangkau masyarakat pada ruang pelayanan. Temuan ini sejalan dengan Arrasi (2022) yang menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Marzidhan et al. (2023) juga menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Selain itu, Mulyadi et al. (2024) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Dengan demikian, intervensi edukatif melalui media banner relevan digunakan untuk memperluas akses informasi sekaligus memperkuat literasi pajak masyarakat pada level kelurahan.



Gambar 1. Observasi awal dan identifikasi pelayanan administrasi di Kantor Lurah Panorama.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembuatan Banner

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Tim pengabdian terlebih dahulu melakukan observasi lapangan dan berdiskusi dengan

perangkat kelurahan untuk mengidentifikasi masalah pembayaran PBB. Setelah itu, tim pengabdian mengundang warga, khususnya warga RT 08, agar hadir pada kegiatan sosialisasi. Materi sosialisasi disusun berdasarkan kebutuhan informasi masyarakat, yaitu pengertian PBB, manfaat pembayaran pajak, fungsi pajak bagi pembangunan daerah, serta prosedur pembayaran PBB melalui Kantor Lurah Panorama. Materi tersebut kemudian diringkas dalam bentuk banner agar mudah dibaca oleh masyarakat.

Media banner dipilih karena memiliki keunggulan praktis, murah, mudah ditempatkan di ruang pelayanan, dan dapat dibaca berulang oleh warga yang datang ke kantor kelurahan. Dalam komunikasi publik, media visual membantu menyederhanakan pesan administratif sehingga lebih cepat dipahami oleh masyarakat. Banner dalam kegiatan ini tidak hanya menjadi pelengkap dokumentasi, tetapi berfungsi sebagai alat edukasi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendekatan sosialisasi pajak yang menekankan pentingnya penyampaian informasi secara konsisten, mudah dipahami, dan dekat dengan wajib pajak agar masyarakat terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.



Gambar 2. Tim pengabdian mengundang warga untuk mengikuti kegiatan sosialisasi PBB



Gambar 3. Proses desain banner sebagai media literasi pembayaran PBB.



Gambar 4. Penyerahan banner literasi PBB kepada pihak Kelurahan Panorama.

Capaian Peningkatan Literasi dan Manfaat bagi Masyarakat

Capaian utama kegiatan ini adalah tersedianya banner literasi PBB berukuran 160 x 60 cm yang ditempatkan di Kantor Lurah Panorama dan terlaksananya sosialisasi kepada [isi jumlah peserta] orang peserta. Banner tersebut membantu masyarakat mengetahui bahwa pembayaran PBB dapat difasilitasi melalui kantor kelurahan dengan membawa SPPT dan uang sesuai nominal tagihan. Informasi prosedural yang disampaikan melalui banner membuat masyarakat lebih mudah memahami tahapan pembayaran, mulai dari melapor kepada pegawai kelurahan, pendataan SPPT, pembayaran sesuai nominal, hingga penerimaan bukti pembayaran sementara.

Manfaat kegiatan juga dirasakan oleh pihak kelurahan karena petugas dapat menggunakan banner sebagai alat bantu

ketika menjelaskan prosedur pembayaran PBB kepada warga. Media tersebut mengurangi ketergantungan pada penjelasan lisan yang berulang dan membantu menjaga konsistensi informasi layanan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa inovasi pelayanan tidak selalu harus berbasis teknologi digital; media visual sederhana juga dapat menjadi bentuk inovasi layanan apabila mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Dari sisi pembangunan daerah, edukasi PBB mendukung peningkatan kesadaran pajak yang pada akhirnya dapat memperkuat penerimaan daerah dan pembiayaan pelayanan publik.

Tabel 1. Evaluasi Sederhana Capaian Literasi PBB Setelah Sosialisasi.

Aspek Evaluasi	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Setelah Kegiatan	Indikator Capaian
Akses informasi PBB	Informasi masih banyak diperoleh secara lisan dan belum tersaji secara ringkas di ruang pelayanan .	Informasi prosedur pembayaran PBB tersedia dalam bentuk banner yang dapat dibaca masyarakat.	Tersedianya satu banner edukatif di Kantor Lurah Panorama .
Pemahaman prosedur pembayaran	Sebagian warga belum mengetahui tahapan pembayaran PBB melalui kantor kelurahan.	Warga memperoleh informasi tahapan pembayaran melalui sosialisasi dan media banner.	Peserta memahami perlunya membawa SPPT dan membayar sesuai nominal tagihan.
Dukungan layanan kelurahan	Petugas menjelaskan prosedur	Banner menjadi alat bantu petugas	Petugas memiliki media komunika

	secara berulang kepada warga yang bertanya.	dalam menjelaskan layanan pembayaran PBB.	si visual di ruang pelayanan .
Jangkauan edukasi	Sosialisasi tatap muka terbatas pada warga yang hadir.	Banner dapat dibaca kembali oleh warga yang datang setelah kegiatan sosialisasi .	Informasi tetap tersedia meskipun sosialisasi tatap muka telah selesai.



Gambar 5. Pelaksanaan sosialisasi pembayaran PBB kepada masyarakat Kelurahan Panorama.



Gambar 6. Banner literasi PBB yang ditempatkan pada ruang pelayanan kelurahan.



Gambar 7. Dokumentasi pelayanan pembayaran PBB di Kantor Lurah Panorama.

Kendala Pelaksanaan dan Pemecahan Masalah

Kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan adalah sulitnya mengumpulkan warga pada saat sosialisasi. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki aktivitas masing-masing, keterbatasan waktu, serta belum tingginya minat untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pajak. Kendala ini menunjukkan bahwa sosialisasi tatap muka memiliki keterbatasan apabila tidak didukung oleh media informasi yang dapat diakses kapan saja. Oleh karena itu, penggunaan banner menjadi solusi yang tepat karena pesan sosialisasi tetap dapat dibaca oleh masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan.

Kendala lain yang ditemukan adalah adanya persepsi masyarakat bahwa pembayaran PBB sering kali rumit karena harus menunggu antrean di bank atau terkendala sistem. Melalui sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman bahwa pembayaran PBB dapat difasilitasi melalui Kantor Lurah Panorama sehingga proses administrasi menjadi lebih dekat dan praktis. Pemecahan masalah dilakukan dengan menyampaikan tahapan pembayaran secara sederhana dan menempatkan informasi tersebut pada banner. Strategi ini menunjukkan bahwa solusi pengabdian harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan

kapasitas mitra agar dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Tabel 2. Ringkasan Permasalahan, Solusi, dan Capaian Kegiatan

Permasalahan Mitra	Solusi Pengabdian	Capaian
Kurangnya informasi prosedural mengenai pembayaran PBB	Penyusunan materi dan pemasangan banner informatif	Masyarakat memperoleh informasi pembayaran PBB secara lebih mudah
Persepsi bahwa pembayaran PBB harus dilakukan di bank	Sosialisasi kemudahan pembayaran melalui Kantor Lurah Panorama	Masyarakat memahami alternatif layanan pembayaran di kelurahan
Sulitnya mengumpulkan warga untuk sosialisasi tatap muka	Penyediaan media informasi yang dapat dibaca berulang	Informasi tetap tersedia bagi warga yang tidak hadir dalam sosialisasi
Keterbatasan alat bantu petugas dalam menjelaskan layanan	Banner digunakan sebagai media edukasi di ruang pelayanan	Petugas terbantu dalam memberikan penjelasan yang konsisten

Kontribusi Kegiatan Pengabdian

Kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan literasi pajak masyarakat dan penguatan kualitas pelayanan administrasi di tingkat kelurahan. Pembayaran pajak yang tertib dapat mendukung ketersediaan sumber daya fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Edukasi pajak kepada masyarakat juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif karena masyarakat memahami perannya dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian tidak hanya menyampaikan informasi teknis, tetapi juga membangun kesadaran kewargaan bahwa pajak merupakan bagian dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan.

Praktik baik dari kegiatan ini adalah penggunaan media sederhana yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Banner dipilih bukan karena sifatnya yang modern, tetapi karena sesuai dengan kondisi pelayanan kelurahan dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Pendekatan ini dapat direplikasi di kelurahan lain yang menghadapi permasalahan serupa, terutama pada layanan publik yang membutuhkan informasi prosedural singkat dan jelas. Agar dampaknya lebih kuat, kegiatan serupa pada masa mendatang dapat dilengkapi dengan pengukuran pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah sosialisasi, pendataan jumlah warga yang membayar PBB setelah pemasangan banner, serta integrasi dengan media digital kelurahan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan melalui media banner di Kantor Lurah Panorama berhasil menyediakan sarana edukasi visual yang membantu masyarakat memahami manfaat, fungsi, dan prosedur pembayaran PBB. Kegiatan ini juga menghasilkan media informasi permanen di ruang pelayanan kelurahan serta evaluasi sederhana yang menunjukkan adanya peningkatan akses informasi, pemahaman prosedur, dan dukungan layanan administrasi. Permasalahan awal berupa kurangnya sosialisasi, rendahnya pemahaman wajib pajak, kendala antrean pembayaran, serta persepsi bahwa pembayaran PBB hanya diperlukan saat ada kebutuhan administrasi tertentu dapat direspons melalui penyediaan media edukasi visual yang sederhana dan mudah diakses. Kegiatan ini membantu pihak kelurahan dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi dan mendukung upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dosen Pembimbing Lapangan, Lurah Panorama, Sekretaris Kelurahan Panorama, perangkat kelurahan, masyarakat Kelurahan Panorama, serta seluruh anggota tim pengabdian yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2019). Analisis pajak daerah dan retribusi daerah. *Jurnal Akuntansi*, 14, 299–306.
- Ariani, N. K. T. A., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2025). Pengaruh inovasi pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.
- Dewi, L. K. (2020). Fungsi administrasi dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains*, 5(1), 34–46.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Musabab PBB-P2 dialihkan jadi pajak daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fadilah, M. S., Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Mukmin, M. N. (2024). Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB): Kajian terhadap pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. *Jurnal Akunida*, 10(2).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- Marliani, L. (2018). Definisi administrasi dalam berbagai sudut pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 142–151.
- Prong, F. N., Lambey, R., & Latjandu, L. D. (2023). Analisis penerapan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(2), 113–120.
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- United Nations Development Programme. (2024). How do taxes drive the Sustainable Development Goals?
- Arrasi, R. D. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. *Jurnal*

Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 10(1),
91–102.

<https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>

Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Economina*, 2(10), 3041–3056.

<https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.932>

Mulyadi, R. A., Alansori, A., & Sari, A. L. (2024). Pengaruh pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati*, 13(4). <https://doi.org/10.33024/jur.jeram.v13i4.19547>